

STUDI TENTANG UNSUR EKSPEKTASI DI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTU KARISMAWAN
Fak. Ekonomi Universitas Mataram

ABSTRAK

Semenjak diberlakukannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 tahun 1999, telah banyak dilakukan kajian tentang hal-hal yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu yang menjadi bahan kajian adalah mengenai sumber-sumber penerimaan daerah.

Fokus pertama pada penelitian ini adalah sumber-sumber penerimaan daerah, berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah; kedua, tentang kemungkinan adanya unsur ekspektasi di dalam APBD kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Unsur Ekspektasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa besaran DAU yang diharapkan pada anggaran tahun tertentu ditentukan atas dasar besaran DAU yang diperoleh daerah pada periode lalu. Ada atau tidak unsur ekspektasi ini ditelusuri melalui teknik analisis regresi dengan menggunakan *time lag* satu tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber penerimaan Kota Mataram masih didominasi oleh DAU. Koefisien regresi baik DAU tidak signifikan, yang berarti bahwa tidak terdapat unsur ekspektasi di dalamnya. Ini artinya bahwa besaran DAU yang diharapkan diperoleh tahun tertentu tidak berkorelasi dengan besaran DAU yang diperoleh tahun yang lalu.

Kata kunci: ekspektasi, lag

PENDAHULUAN

Latar Belakang

UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 tahun 1999, mengatur kewenangan dan kewajiban anatar pemerintahan pusat dan daerah. Sebelumnya, sentralisasi kekuasaan sangat terasa dalam setiap aktivitas pemerintahan di daerah, bahkan rancangan pembangunan disetiap daerah lebih sering mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. Sentralisasi telah membuat birokrasi di daerah seperti didikte dan selalu menunggu petunjuk dari pusat. Sentralisasi kekuasaan tersebut membuat birokrasi di daerah menjadi mandul, tidak ada keberanian membuat keputusan strategis bahkan kekuasaan tersebut telah membuat birokrasi di daerah lamban dalam melakukan inovasi dan mengembangkan terobosan-terobosan untuk mempercepat pembangunan. Sentralisasi menimbulkan disparitas pendapatan yang sangat lebar antar daerah, misalnya alokasi dalam penggunaan anggaran negara dan kelambanan dalam menuntaskan persoalan.

Implikasi dari kebijakan otonomi daerah tersebut adalah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintah daerahnya masing-masing. Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan untuk mengatur diri sendiri itu luas, nyata dan bertanggung-jawab. Hal ini menimbulkan peningkatan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar.

Penyelenggraan otonomi daerah harus mampu mewujudkan penyelenggraan pemerintah yang lebih efisien dan efektif, demokratis, mendorong peran serta masyarakat, wujudkan pemerataan dan keadilan serta mampu memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakatnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memerhatikan hubungan susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan. Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut telah memberi angin segar pada daerah untuk mengelola keuangan sendiri dengan lebih otonom, karena yang lebih mengerti persoalan daerahnya adalah Pemerintah Daerah itu sendiri.

Kota Mataram sebagai bagian dari Provinsi NTB, sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diberikan wewenang baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah provinsi untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Wewenang dalam bidang keuangan daerah yang meliputi hak-hak pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah, Penyelenggaraan penyusunan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, serta Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Struktur APBD Kota Mataram terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kelompok pendapatan meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan untuk Belanja Daerah didalam APBD Secara umum dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu: Belanja administrasi umum, Belanja operasi pemeliharaan sarana dan prasarana publik, Belanja modal, Belanja transfer, dan Belanja tak terduga.

Untuk mengetahui Anggaran dan Belanja Daerah Kota Mataram selama kurun waktu Tahun Anggaran 2001- 2008 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2001-2008 (dalam milyar rupiah)

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah
2001	139,8	133,1
2002	168,7	161,4
2003	211,1	216,2
2004	222,4	216,1
2005	244,8	236,5
2006	358,5	319,4
2007	418,1	420,6
2008	428,3	445,7

Sumber : Bagian Keuangan Kantor Walikota Mataram

Pada Tabel 1 di atas, tampak secara umum realisasi APBD Kota Mataram selama kurun waktu Tahun Anggran 2001 - 2008 terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah pendapatan daerah dan belanja daerah pada anggaran daerah yang terus bertambah. Meningkatnya jumlah APBD disebabkan oleh semakin meningkatnya penerimaan daerah dari PAD dan komponen Dana Perimbangan tiap tahunnya yang merupakan trasfer dari pemerintah pusat dalam rangka untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar.

Anggaran Pendapatan Kota Mataram yang terdiri dari tiga jenis Dana Perimbangan seperti tersebut di atas bersama dengan PAD merupakan sumber dana daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah. Setiap jenis Dana Perimbangan memiliki fungsinya masing-masing. Dana bagi hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. Dana Alokasi Umum (DAU) berperan sebagai pemerata fiskal antardaerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Diluar dari ketiga fungsi tersebut, untuk secara detailnya, penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah Kabupaten/Kota

dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan upaya penegasan langsung kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sebaik-baiknya. Oleh karena faktor keuangan merupakan faktor yang sangat esensial serta merupakan indikasi “derajat kemandirian daerah” untuk mengatur, membiayai, dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka sumber-sumber keuangan daerah yang harus dikelola sebaik-baiknya agar dapat memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan kegiatan pelayanan pemerintah daerah dan untuk pencapaian kebutuhan pelayanan pemerintah harus didukung dengan sumber keuangan yang memadai.

Untuk mengetahui realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram selama kurun waktu Tahun Anggaran 2001-2008 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2001-2008 (dalam milyar rupiah)

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Yang Sah
2001	10,3	147,2	7,3
2002	14,1	151,0	3,4
2003	18,1	182,3	10,7
2004	17,3	196,1	9,1
2005	21,3	214,7	8,8
2006	26,0	332,5	0
2007	28,9	357,7	7,2
2008	32,8	380,6	2,4

Sumber : Bagian Keuangan Kantor Walikota Mataram

Berdasarkan Tabel 2 di atas, bahwa realisasi pendapatan kota Mataram selama kurun waktu Tahun Anggaran 2001-2008 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2004 menurun dari 18,1 milyar rupiah pada tahun 2003 menjadi 17,3 milyar rupiah pada tahun 2004. Ini terjadi karena menurunnya jumlah pendapatan daerah dari PAD yaitu dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2004 ini. Meningkatnya jumlah pendapatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah sudah cukup optimal untuk meningkatkan penerimaannya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya PAD dan jumlah Dana Perimbangan dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2001 hingga 2008. Walaupun demikian, PAD yang meningkat masih belum mampu mencukupi kebutuhan pembiayaan daerah yang sangat besar. Jika dibandingkan antara transfer dan PAD maka sumber pendapatan daerah terbesar adalah berasal dari bantuan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan usaha-usaha Pemerintah Kota Mataram dalam menggali potensi-potensi PAD agar mampu membiayai kegiatan sendiri dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan pusat dapat dikurangi.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah finansial. Meski begitu pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa DAU

Pada praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber dana utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemerintah Daerah “dilaporkan” di perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri.

Jika dibandingkan antara DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram, maka pendapatan daerah yang paling besar adalah berasal dari DAU, hal ini berarti bahwa belum adanya kemandirian di dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah atau belum optimalnya pencapaian PAD Kota Mataram. Hal ini dapat kita cermati dari sumber Pendapatan Daerah terbesar bersumber dari bantuan pusat (Dana Alokasi Umum). Untuk mengetahui perbandingan DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram selama kurun waktu Tahun Anggaran 2001-2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi Penerimaan DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2001-2008 (dalam milyar rupiah)

Tahun Anggaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Belanja Daerah
2001	92,3	10,3	133,1
2002	120,9	14,1	161,4
2003	146,1	18,1	216,2
2004	152,6	17,3	216,1
2005	167,7	21,3	236,5
2006	247,2	26,0	319,4
2007	287,6	28,9	420,6
2008	301,8	32,8	445,7

Sumber : Bagian Keuangan Kantor Walikota Mataram

Beberapa peneliti menemukan respon Pemerintah Daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak). Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Oates (dalam Halim, 2002) menyatakan bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer dari pada pendapatannya sendiri, maka disebut *Flypaper Effect*. Kusumadewi dan Rahman (2007) melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota di Indonesia memperoleh hasil bahwa Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) pada masing-masing kondisi daerah memiliki pengaruh lebih kuat terhadap Belanja Daerah dari pada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Ini mengindikasikan bahwa *Flypaper Effect* tidak hanya terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah dengan PADnya tinggi.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut: Apakah ada unsur ekspektasi pada anggaran pendapatan Kota Mataram?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur ekspektasi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Mataram. Manfaat penelitian ini adalah secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan, sekaligus dapat memberikan sumbangan informasi yang berarti bagi para peneliti lainnya yang berminat untuk melakukan penelitian permasalahan yang sama, secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan referensi bagi pemerintah Kota Mataram dalam memutuskan kebijakan-kebijakan dimasa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai data-data dan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian masalah yang timbul oleh peneliti dilakukan suatu analisis sesuai dengan penjelasan dan tujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. (Moh. Nasir, 2005 : 54)

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kasus (*case study*) yaitu penelitian tentang suatu obyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas (Moh. Nazir, 2005).

Penggunaan metode kasus ini hanya dilakukan pada satu daerah/lokasi penelitian yaitu kota Mataram, dengan tujuan untuk mencoba menganalisis bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) dan apakah terjadi *Flypaper Effect* dari pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut pada belanja Pemerintah Daerah di Kota Mataram.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi.

Variabel dan Definisi Variabel

Variabel penelitian ini terdiri dari a). variabel terikat yaitu Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2001-2008. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran, 2). variabel bebas yang terdiri dari DAU dan PAD.

DAU merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelajarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. PAD merupakan semua penerimaan Pemerintah Kota Mataram yang berasal dari sumber ekonomi asli Kota Mataram yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Analisis

Alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda (*multiple regression*) dengan menggunakan *Software Eviews* versi 5,0. Analisis regresi ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan/pajak terhadap pengeluaran pemerintah (Hoover dan Sheffrin, 1992 dalam Widiyanto (2004)).

Regresi berganda digunakan untuk memprediksi apakah komponen-komponen pendapatan daerah tersebut secara serempak mempengaruhi Belanja Daerah. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y}_t = \alpha + b_1X_{1,t-1} + b_2X_{2,t-1} + e$$

dimana: \hat{Y}_t = Belanja Daerah (BD) pada tahun t; α = Konstanta; $X_{1,t-1}$ = DAU periode sebelum tahun t; b_1 = Koefisien regresi DAU; $X_{2,t-1}$ = PAD periode sebelum tahun t; b_2 = Koefisien regresi PAD; e = Error term.

Uji statistik digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan baik secara parsial maupun simultan. Pengujian secara parsial menggunakan uji t (t-test) dengan prosedur pengujian sebagai berikut :

1. Menentukan formulasi hipotesis.

Ho : $\beta_i = 0$ atau variabel $X_{1,t-1}$ (DAU) atau $X_{2,t-1}$ (PAD) tidak berpengaruh significant terhadap variabel Y_t (BD);

Ha: $\beta_i \neq 0$ atau variabel $X_{1,t-1}$ (DAU) atau $X_{2,t-1}$ (PAD) berpengaruh significant terhadap variabel Y_t (BD).

2. Menentukan *Level Of Significant*, $\alpha = 5\%$

3. Kriteria pengujian

Ho diterima bila : $-t\text{-hitung} \leq t_{\alpha/2;(n-k)} \leq t\text{-hitung}$

Ho ditolak bila : $t\text{-hitung} \geq t_{\alpha/2;(n-k)}$ atau $-t\text{-hitung} \leq -t_{\alpha/2;(n-k)}$

4. Formulasi perhitungan uji t (t-test) adalah :

$$t\text{-hitung} = \frac{b_i}{Se(b_i)}$$

5. Kesimpulan :

Apabila t-hitung berada pada daerah terima Ho berarti variabel $X_{i,t-1}$ tidak berpengaruh significant terhadap variabel Y_t (BD); dan Jika t-hitung berada pada daerah tolak Ho berarti variabel $X_{i,t-1}$ berpengaruh significant terhadap variabel Y_t (BD).

Sedangkan pengujian secara simultan menggunakan uji F (F-test), dengan prosedur pengujian sebagai berikut :

1. Formulasi hipotesis :

Ho : Diduga secara simultan variabel $X_{1,t-1}$ (DAU) dan $X_{2,t-1}$ (PAD) tidak berpengaruh significant terhadap variabel Y_t (BD);

Ha : Diduga secara simultan variabel $X_{1,t-1}$ (DAU) dan $X_{2,t-1}$ (PAD) berpengaruh significant terhadap variabel Y_t (BD).

2. Menentukan *Level Of Significant*, $\alpha = 5\%$

3. Kriteria pengujian : Ho diterima bila : $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ dan Ha ditolak bila : $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$

4. Menentukan nilai uji statistik (nilai F-hitung)

$$F\text{-hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

dimana : R^2 : koefisien determinasi, k : Jumlah variabel, n : Jumlah sampel

5. Kesimpulan :

Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ maka H_0 diterima, artinya bahwa secara bersama-sama variabel $X_{1,t-1}$ (DAU) dan $X_{2,t-1}$ (PAD) tidak mempunyai pengaruh yang significant terhadap variabel Y_t (BD). Dan jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ maka H_0 diterima, artinya bahwa secara bersama-sama variabel $X_{1,t-1}$ (DAU) dan $X_{2,t-1}$ (PAD) mempunyai pengaruh yang significant terhadap variabel Y_t (BD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data keuangan daerah Kota Mataram yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data keuangan dalam penelitian ini adalah data APBD Kota Mataram Tahun 2001-2008 yang berupa Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, tetapi yang menjadi sorotan peneliti adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah Kota Mataram yang terealisasi selama Tahun 2001-2008.

Perkembangan APBD dan PAD Mataram Tahun Anggaran 2001-2008

Perkembangan APBD Kota Mataram selama periode penelitian, yaitu tahun 2001-2008 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan anggaran belanja (Tabel 4). Demikian juga PAD secara keseluruhan meningkat (Tabel 5)

Tabel 4. Realisasi APBD Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2001-2008 (milyar rupiah)

Tahun Anggaran	Jumlah Realisasi		
	Pendapatan	Belanja Daerah	Pembiayaan
2001	140,0	133,1	6,6
2002	168,7	161,4	9,0
2003	211,1	216,2	5,1
2004	222,4	216,1	6,4
2005	244,8	236,5	8,3
2006	358,5	319,4	39,1
2007	418,1	420,6	60,4
2008	428,3	445,7	67,5

Sumber : Bagian Keuangan Kantor Walikota Mataram

Tabel 5. Realisasi PAD Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2001-2008 (milyar rupiah)

Tahun Anggaran	Sumber-Sumber PAD			Jumlah PAD
	Pajak Daerah	Rtribusi Daerah	Penerimaan lainnya	
2001	4,6	4,2	1,5	10,3
2002	6,6	5,1	2,4	14,1
2003	8,1	5,9	4,1	18,1
2004	8,8	6,5	2,0	17,3
2005	9,8	7,4	4,1	21,3
2006	11,3	8,6	6,1	26,0
2007	12,7	8,6	7,6	28,9
2008	14,5	10,2	8,1	32,8

Sumber : Bagian Keuangan Kantor Walikota Mataram

Berdasarkan tabel 4 diatas, terlihat secara umum realisasi APBD Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2001-2008 mengalami peningkatan baik pada sisi pendapatan maupun anggaran belanja, ini disebabkan karena adanya berbagai upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan, baik yang bersumber dari PAD maupun dari dana perimbangan. Selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, sedangkan selama tahun 2001-2008 pembiayaan total Kota Mataram mengalami fluktuasi. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2006, ini dapat dilihat pada jumlah pengeluaran pembiayaan yang lebih sedikit di bandingkan dengan penerimaan pembangunan. Jumlah pembiayaan yang semakin menurun terjadi karena adanya realisasi belanja yang tidak terserap oleh atau yang dengan kata lain adanya anggaran belanja yang tidak teralokasikan, sehingga anggaran tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran belanja pada tahun berikutnya. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan dari pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi NTB.

Penerimaan DAU Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2001-2008

Untuk memberikan gambaran mengenai laju pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kota Mataram sebagaimana terdapat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2001-2008 (milyar rupiah)

Tahun Anggaran	Dana Alokasi Umum dalam (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2001	92,3	-
2002	120,9	31,00
2003	146,1	20,79
2004	152,6	4,48
2005	167,7	9,85
2006	247,2	47,46
2007	287,6	16,31
2008	301,8	4,94

Sumber: Bagian Keuangan Kantor Walikota Mataram.

Salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumbangan Pemerintah Pusat yaitu berupa DAU, dimana secara absolut setiap tahunnya sumber penerimaan ini terus mengalami peningkatan, walau pertumbuhannya masih tidak stabil yaitu berkisar antara 4,48 persen sampai dengan 47,46 persen. Persentase pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 4,48 persen dan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 47,46 persen. Bila dirata-ratakan maka pertumbuhan DAU setiap tahunnya adalah sebesar 16,85 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penerimaan dari DAU naik tiap tahunnya dan diantara sumber-sumber penerimaan Pemerintah Daerah Kota Mataram, penerimaan yang bersumber dari DAU merupakan sumber penerimaan yang paling besar baik dilihat dari besarnya penerimaan DAU untuk setiap tahunnya, maupun dari segi pertumbuhannya.

Anggaran Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2001-2008

Pelaksanaan otonomi daerah memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk mengelola keuangan daerah, untuk Anggaran Belanja Daerah dialokasikan untuk belanja aparatur dan belanja pelayanan publik. Belanja aparatur daerah diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas perangkat daerah, dimana setiap penggunaan anggaran harus diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan belanja pelayanan publik diprioritaskan pada kegiatan atau program pembangunan yang hasil, dampak dan manfaat dirasakan oleh masyarakat.

Dari Tabel 5 dan 6 dapat dilihat bahwa persentase kontribusi DAU lebih besar dibandingkan dengan persentase kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram. Kontribusi DAU yang berkisar antara 67,57 % sampai 77,41 % dengan persentase rata-rata 70,86 %. Sedangkan persentase PAD terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram hanya berkisar antara 06,87 % sampai 09,02 % dengan persentase rata-rata 08,03 % saja.

Pengujian Hipotesis

Pengujian atas pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama kedua variabel tersebut yaitu DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram. Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis menunjukkan bahwa secara bersama-sama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram, sehingga persamaannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\hat{Y} = -(4,46E+10) + 0,88X_{1,t-1} + 7,11X_{2,t-1}$$

Hasil analisis regresi berganda dengan bantuan *Software Eviews* versi 5,0 tentang pengaruh Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2001-2008 dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini :

Tabel 7. Hasil Estimasi dengan Lag satu tahun.

Variabel	Koefisien	SE	t-hitung	Probabilitas
Constant	-4.46E+10	4,20E+10	-0,11	-0,92
X _{1,t-1}	0,88	0,77	2,70	0,04
X _{2,t-1}	7,11	8,20	0,87	0,72
R-squared (R ²)	= 0.96			
F-statistic	= 45,07		F-tabel = 5.79	
Probabilitas (F-statistic)	= 0.0018		t-tabel = 2.57	

Hasil analisis regresi linier berganda yang terlihat pada Tabel 7 di atas menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram yang ditunjukkan oleh nilai F-statistic atau F-hitung sebesar 149.3909 lebih besar dari pada nilai F-tabel yang hanya sebesar 5,79 ($F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$), yaitu bahwa secara bersama-sama variabel X_{1t-1} (DAU) dan X_{2t-1} (PAD) mempengaruhi Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram. Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja daerah Pemerintah Kota Mataram juga dapat dilihat dari nilai probabilitas (F-statistic) pada tabel diatas, yaitu sebesar 45,07 yang lebih besar dari nilai F tabel dengan α lima persen (5%).

Adapun besarnya pengaruh perubahan Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram yang disebabkan oleh perubahan DAU dan PAD ditunjukkan oleh nilai R^2 yaitu sebesar 0,96 atau 96%. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan diduga bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram diterima. Sedangkan sisanya yaitu 4% perubahan Belanja Daerah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Lain-lain Pendapatan yang sah dan Pembiayaan Daerah.

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2001-2008

Pengujian untuk melihat apakah ada unsur ekspektasi pada Anggaran Belanja Daerah dilakukan dengan model regresi linier berganda (*multiple regression*). Dari nilai t-statistik atau t-hitung tampak bahwa secara parsial DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. maka dapat kita lihat bahwa secara statistik variabel X_{1t-1} yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun yang lalu mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap variabel Y_t yaitu Belanja Daerah pada tahun t, karena nilai t-hitung lebih besar dari pada nilai t-tabelnya yaitu $2,70 > 2.57$ pada alfa (α) lima persen (5%).

Dari Tabel 7 di atas dapat dilihat nilai t-hitung, probabilitas dan R^2 , hasilnya menunjukkan bahwa nilai t-hitung untuk Uji parsial adalah 2,70. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan positif antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram pada setiap periode pengamatan yaitu pada tahun 2001 sampai tahun 2008, yang juga ditunjukkan oleh nilai t-hitung yang lebih besar dibandingkan nilai t-tabel ($2,70 > 2.57$). Selain itu, pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram dapat dilihat dari nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,04 lebih kecil dari nilai alfa 5% ($0.04 < 0.05$).

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2001-2008

Pengujian untuk melihat apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram dilakukan dengan model regresi linier berganda (*multiple regresion*). Dari nilai t-statistik atau nilai t-hitung tampak bahwa secara parsial PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram. Maka dapat kita lihat bahwa secara statistik variabel X_{2t-1} yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun yang lalu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y_t yaitu Belanja Daerah, karena nilai t-hitung atau nilai t-statistic lebih kecil dari pada nilai t-tabelnya yaitu $0,87 < 2.57$ pada alfa (α) lima persen atau dengan membandingkan nilai probabilitas dengan alfa (α) lima persen (5%). Nilai probabilitas sebesar 0,72 lebih besar dari alfa (α) 5%, artinya variabel X_{2t-1} yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD) tidak mempengaruhi variabel Y_t (Belanja Daerah) pada setiap periode pengamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat hasil analisis tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram pada tabel 7.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil pengujian hipotesis pertama diterima, artinya bahwa secara bersama-sama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli daerah (PAD) mempengaruhi Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram secara signifikan pada setiap periode pengamatan yaitu Tahun Anggaran 2001-2008.
2. Hipotesis kedua juga diterima, karena secara parsial hanya Dana Alokasi Umum (DAU) yang secara signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram. Artinya

bahwa ada unsur ekspektasi pada Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram pada setiap periode pengamatan

Saran-Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian disarankan sebagai berikut :

1. Temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah kota Mataram bukan hanya untuk menutup celah fiskal yang ada pada kemampuan keuangan daerah, namun juga sebagai sumber penerimaan utama untuk membiayai belanja daerah. Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah ke depannya, adalah agar lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan inovasi dan menggali potensi daerah di luar pajak daerah, sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani oleh kenaikan pajak, dan PAD yang dihasilkan mampu membiayai belanja daerah itu sendiri. Serta mengadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap aparatur daerah yang mengurus masalah pajak dan retribusi agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran dalam penanganannya.
2. Diharapkan agar otonomi daerah di Kota Mataram dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga suatu daerah benar-benar dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukri dan Halim, Abdul. (2003). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi VI, Yogyakarta.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Indeks Gramedia. Gorontalo.
- Firmansyah, M. 2008. *Ekonometrika Aplikasi Regresi, Poling Analysis dan Uji kausalitas*. Arga Puji Press. Mataram Lombok.
- Kuncoro, Haryo. 2007. *Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Symposium Nasional Akuntansi X Makasar.
- Kusumadewi, Diah Ayu dan Rahman, Arief. 2007. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. JAAI Vol. 11 No.1
- Maemunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Sumatra*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Maulida, Pratiwi Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum(DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Perdanato, Arif. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Pada Kabupaten/Kota di Sulawesi*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas islam Indonesia.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah : studi empiric di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY*. JAAI Vol. 8 No. 2
- Rochman. 2007. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Suparmoko. 2001. *Ekonomi Publik. (untuk keuangan dan pembangunan daerah)*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Supranto, J. *Ekonometri (Buku Kedua)*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Triwidodo, pambudi. 2007. *Flypapper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Bali : Studi Pada Kabupaten/Kota di Bali*. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Widiyanto. 2005. *Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.